



**Sambutan**  
**Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**  
**Pertemuan Lengkap Struktural dan Fungsional**  
**(Vicon) Tahun 2018**

*Assalammu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera

Yang saya hormati:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN
3. Para Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional serta seluruh pegawai di lingkungan BKKBN

Pertama-tama, marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya-lah pada pagi ini kita dapat mengikuti pertemuan lengkap pegawai Struktural dan fungsional BKKBN. Pertemuan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan kedisiplinan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di lingkungan BKKBN.

Hadirin yang terhormat,

Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2018. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pegawai ASN BKKBN, yang telah bekerja keras guna melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini.

Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi pendorong semangat kita semua agar dapat bekerja dengan lebih baik tahun ini dalam rangka mencapai sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya mengajak seluruh pegawai di lingkungan BKKBN agar bekerja dengan jujur dan integritas tinggi, taat hukum, bertanggung jawab dan akuntabel, menghormati orang lain dan tidak mudah menyalahkan, mencintai pekerjaan, mau bekerja keras, meningkatkan transparansi dan koordinasi, berdisiplin tinggi, dan hidup bersahaja.

Saudara – saudara yang saya hormati,

Realisasi anggaran BKKBN APBN-P TA 2017 hanya mencapai 2,05 triliun atau sebesar 75%, berdasarkan tren realisasi, penyerapan anggaran tersebut merupakan kinerja anggaran TERENDAH selama 7 tahun terakhir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, pada pasal 3 dijelaskan bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Kementerian Negara/Lembaga dapat terbebas dari sanksi apabila:

1. Persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%;
2. Persentase realisasi capaian output paling sedikit 95%;
3. Laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian.

Lebih lanjut, penyerapan anggaran yang rendah biasanya memiliki hubungan paralel dengan pencapaian kinerja. Jika ternyata penyerapan anggaran rendah, kemudian output tidak tercapai dan prioritas nasional sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA BKKBN juga tidak tercapai,

maka ini merupakan indikasi kuat bahwa kita belum mampu mengelola program dan anggaran dengan baik.

Selanjutnya dalam waktu kurang dari sebulan, selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana, BKKBN akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Rakornas diselenggarakan sebagai salah satu upaya penajaman program dan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2018. Dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 telah dirumuskan berbagai langkah strategis yang dimulai dari sisi program, bidang, sampai dengan kegiatan yang telah diikat target dan sasarannya.

Untuk itu, saya mengajak segenap pegawai ASN BKKBN agar menyikapi permasalahan terhadap capaian realisasi anggaran TA 2017 dengan rumusan rencana aksi dan tindak lanjut yang bersifat segera dan meningkatkan kinerja untuk mendukung upaya pencapaian target Renstra BKKBN 2015-2019.

Hadirin yang Berbahagia

Pertemuan ini sengaja di laksanakan untuk lebih mempersiapkan diri dan perangkat kerja menyongsong pelaksanaan kegiatan Tahun 2018. Tidak hanya sekedar menghadirkan seluruh pejabat struktural dan fungsional teknis, akan tetapi saya minta seluruh kedeputian mengevaluasi kegiatan strategis 2017 dan prioritas tahun 2018 program KKBPK. Menyongsong pelaksanaan program dan anggaran tahun 2018, disamping melanjutkan prinsip “money follow program”, semua jajaran dimanapun harus lebih siap dan percaya diri untuk melaksanakannya. Perangkat-perangkat pendukung dari DIPA yang sudah diterima masing-masing unit harus benar-benar dapat dipastikan tersedia dengan baik, seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rencana pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran, alokasi dan jadwal kegiatan,

serta perangkat pembukuan keuangan. Demikian juga dengan kemampuan pengelola anggaran harus benar-benar dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Zona Integritas yang merata dan konsisten di setiap wilayah dan unit kerja semestinya dilaksanakan lebih baik dari tahun lalu. Hasil sementara Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kependudukan & KB Nasional Tahun 2017 yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2017 mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti. Terbentuknya *agent of change*, internalisasi dan pengawasan perubahan menuju Reformasi Birokrasi mulai dari individu sampai tingkat organisasi dan mulai dari BKKBN (Pusat) termasuk Perwakilan BKKBN Provinsi sampai dengan pandangan masyarakat melalui survei kepuasan pelayanan dan persepsi anti korupsi merupakan beberapa catatan penting yang perlu perhatian. Hasil sementara evaluasi akuntabilitas kinerja BKKBN tahun 2017 juga mengindikasikan tren yang kurang baik dengan penurunan menjadi CC dengan nilai total 59,7

Saya minta jajaran Irtama mengawal dengan ketat akan terlaksananya SPIP dan Zona Integritas dan terbangunnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 menuju terciptanya pemerintahan yang bersih. Pengalaman selama empat tahun terakhir yang cukup menyita waktu dan energi kita atas ketidak tahuan atau ketidak patuhan kita terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa, untuk itu mari kita awali tahun 2018 dengan niat yang baik dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya pula termasuk jangan ragu-ragu untuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang lebih mengetahui pengelolaan anggaran dan asset pemerintah. Komunikasi dan interaksi antar kita harus lebih ditingkatkan, forum-forum pengendalian dan

penguatan program, serta forum peningkatan kapasitas SDM harus lebih banyak kita lakukan.

Saudara-saudara yang saya banggakan

Sandingan antara APBN tahun 2017 dari DIPA awal dan pagu anggaran tahun 2018 menunjukkan kenaikan anggaran sebesar Rp. 2,13 triliun. Kenaikan ini adalah untuk belanja gaji 15.352 tenaga PKB/PLKB, yang telah dilakukan penyerahan personil dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Kebutuhan belanja gaji tenaga PKB/PLKB pada tahun 2018 adalah sebanyak Rp. 2.1 triliun. Dengan kebijakan pelaksanaan anggaran “money follow program”, aparatur dan pejabat negara tidak masanya lagi bekerja mengedepankan kerja yang terbatas pada penyelesaian tugas-tugas rutin semata dan masih bercorak ego sektoral atau ego komponen, akan tetapi setiap pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan harus berorientasi langsung kepada out-put dan dampak serta saling berintegrasi. Dengan demikian akan terwujud sinergitas aksi antar komponen atau sektor untuk memaksimalkan sumber daya anggaran, untuk itu saya minta seluruh jajaran Eselon I untuk saling berkomunikasi dan bersinergi memberi perhatian secara serius terhadap peningkatan jangkauan pelayanan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap program KKBPK, memperkuat peran aktif mitra kerja dan memastikan setiap kebutuhan masyarakat akan pelayanan KKBPK dapat terpenuhi. Dengan pelaksanaan “money follow program” diharapkan setiap komponen saling mengkomunikasi kegiatan dan melakukan evaluasi secara bersama-sama pula, menghindari program yang tumpang tindih, mengefektifkan setiap kunjungan dan momentum, serta dapat melakukan pemerataan pelayanan terutama di daerah-daerah yang masih tinggi angka kebutuhan program KKBPK yang tidak terlayani.

Saudara-saudara sekalian,

Kepada para petugas lapangan keluarga berencana PLKB/PKB yang proses pengalihan status kepegawaiannya tetap berjalan, memerlukan peningkatan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Untuk itu yang dipentingkan sekarang bukanlah sekedar seringnya mereka mengadakan pertemuan-pertemuan, akan tetapi berapa sering kita melakukan kunjungan langsung ke wilayah kerja mereka untuk memastikan operasional program KKBPK berjalan secara baik dan menyeluruh. Bersamaan dengan hal tersebut jajaran ke deputian latbang dapat mempersiapkan dan melaksanakan proses pembekalan mereka secara berjenjang dan terarah. PLKB/PKB sebagai pengelola dan pelaksana program di lini lapangan seharusnya dilengkapi dengan berbagai kemampuan, baik kemampuan *leadership*, manajerial maupun kemampuan teknis operasional, serta harus memiliki kompetensi dalam rangka menjawab persoalan KKBPK dimasa depan sehingga PLKB/PKB dapat menjadi leader dan pengelola Kampung KB. Kampung KB merupakan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara terpadu dan komprehensif di tingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW), yang diharapkan dapat memadukan program KB serta berintegrasi bahkan *leader* dari program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu PLKB/PKB menjadi mata rantai penting dalam dinamika program KKBPK. Mereka tidak hanya penyuluh KB, tetapi penyuluh Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan leader dari program Kampung KB dan program lainnya

Bapak/Ibu yang berbahagia,

Mencermati hasil sementara SDKI 2017, hanya satu indikator program KKBPK 2017 menurut data SDKI 2017 yang telah tercapai, yaitu penggunaan MKJP. Namun indikator lain masih dibawah target dan perlu dilakukan intensifikasi dan pendekatan inovasi untuk mengejar ketertinggalan capaian di tahun 2018. Jaringan KBKR yang didukung oleh seluruh kedeputian, untuk lebih menfokuskan kepada pelayanan KB daerah dengan tingkat kebutuhan KB yang tidak terpenuhi masih tinggi, serta tingkat putus pakai kontrasepsi yang juga masih tinggi.

Pembangunan keluarga, tetap memberikan perhatian yang sungguh terhadap peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan remaja terhadap bahaya pernikahan dini atau di bawah umur, kesadaran terhadap penringnya kesehatan reproduksi serta terbangunnya sikap remaja yang produktif menyongsong era bonus demografi. Selain itu program pengasuhan dan pendampingan orang tua terhadap anak balita, remaja, aktifitas peningkatan pendapatan keluarga dan pembinaan penduduk usia lanjut harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat.

Di bidang program pengendalian penduduk, agar Kedeputian Dalduk untuk segera menindaklanjuti kerjasama penggunaan data pemetaan dan pengendalian kependudukan yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga lain. Memastikan kebijakan pengendalian penduduk tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Daerah kabupaten/kota, serta rampungnya "grand design" Kependudukan di seluruh wilayah. Pendidikan kependudukan yang berbasis sekolah dan luar sekolah terus dikembangkan secara merata, beri prioritas untuk wilayah-wilayah miskin dan tingginya angka kawin muda.

Bapak/Ibu yang berbahagia,

Akhirnya, di awal tahun 2018 ini marilah kita singsingkan lengan baju untuk menggerakkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga lebih dahsyat lagi melalui kampung KB demi Indonesia Jaya. Semoga Tuhan seru sekalian alam meridhai dan menguatkan tekad dan langkah kita.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Jakarta, 8 Januari 2018

Plt Kepala BKKBN,

Sigit Prihutomo